



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 503/K. 861/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Timur, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5233);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

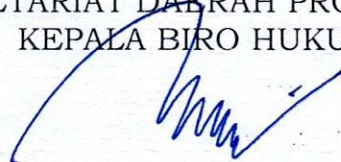
- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - c. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Promosi Penanaman Modal;
  - d. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan;
  - e. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan; dan
  - f. Standar Operasional Prosedur pada Bagian ke Sekretariat.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pemangku tugas dan fungsi masing-masing pejabat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 503/K. 861/2022 TENTANG  
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama Standar Operasional Prosedur	Nomor Standar Operasional Prosedur
1	2	3
A. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan		
1	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (OSS-RBA)	067/001/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
2	Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (OSS-RBA)	067/002/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
3	Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan melalui E-PTSP	067/003/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
4	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota	067/004/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
5	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota	067/005/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
6	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota	067/006/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
7	Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)	067/007/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
8	Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)	067/008/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
9	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi di Bawah 2000 M2) (PBPHH) melalui E-PTSP	067/009/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

1	2	3
10	Perluasan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui E-PTSP	067/010/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
11	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar melalui E-PTSP	067/011/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
12	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Rakyat (PPKH-UPR) melalui E-PTSP	067/012/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
13	Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP) melalui E-PTSP	067/013/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
14	Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) melalui E-PTSP	067/014/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
15	Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui E-PTSP	067/015/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
16	Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (REKOM PPKH) melalui E-PTSP	067/016/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
17	Rekomendasi/Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) melalui E-PTSP	067/017/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
18	Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)	067/018/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
19	Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup melalui E-PTSP	067/019/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
20	Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH melalui E-PTSP	067/020/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
21	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) melalui E-PTSP	067/021/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
22	Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) melalui E-PTSP	067/022/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
23	Perizinan Berusaha Sektor ESDM (OSS-RBA)	067/023.1/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
24	Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) melalui E-PTSP	067/023/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022
25	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) melalui E-PTSP	067/024/DPMPPTSP-LP2N/XI/2022

1	2	3
26	Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) melalui E-PTSP	067/025/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
27	Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)	067/026/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
28	Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian (OSS-RBA)	067/027/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
29	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (OSS-RBA)	067/028/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
30	Perizinan Berusaha Sektor PUPR (OSS-RBA)	067/029/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
31	Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi melalui E-PTSP	067/030/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
32	Pelayanan Izin Pengalihan Alur Sungai melalui E-PTSP	067/031/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
33	Pelayanan Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi melalui E-PTSP	067/032/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
34	Perizinan Berusaha Sektor Transportasi (OSS-RBA)	067/033/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
35	Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan) melalui E-PTSP	067/034/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
36	Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau (KPIT) melalui E-PTSP	067/035/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
37	Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing/Perlintasan Jalan melalui E-PTSP	067/036/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
38	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan (OSS-RBA)	067/037/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
39	Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) melalui E-PTSP	067/038/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
40	Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) melalui E-PTSP	067/039/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
41	Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta melalui E-PTSP	067/040/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022

1	2	3
42	Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta melalui E-PTSP	067/041/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
43	Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta melalui E-PTSP	067/042/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
44	Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)	067/043/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
45	Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS-RBA)	067/044/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
46	Perizinan Berusaha Sektor Sosial (OSS-RBA)	067/045/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
47	Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang melalui E-PTSP	067/046/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
48	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah melalui E-PTSP	067/047/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
49	Izin Berusaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam melalui E-PTSP	067/048/DPMPSTSP-LP2N/XI/2022
B. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
1	Kajian Potensi Peluang Investasi dan Peta Potensi Investasi	067/001/DPMPSTSP-PIPM/XI/2022
2	Pengembangan Potensi Daerah	067/002/DPMPSTSP-PIPM/XI/2022
3	Penyusunan Keputusan Gubernur	067/003/DPMPSTSP-PIPM/XI/2022
4	Penyusunan Peraturan Gubernur	067/004/DPMPSTSP-PIPM/XI/2022
5	Penyusunan Peraturan Daerah	067/005/DPMPSTSP-PIPM/XI/2022
C. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Promosi Penanaman Modal		
1	Koordinator Penyelenggaraan Pameran	067/001/DPMPSTSP-PPM/XI/2022
2	Mengikuti Pameran Dalam/Luar Daerah/ Negeri	067/002/DPMPSTSP-PPM/XI/2022
3	Penjajakan Kerjasama Penanaman Modal	067/003/DPMPSTSP-PPM/XI/2022
4	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal	067/004/DPMPSTSP-PPM/XI/2022
5	Rencana Tindaklanjut Kerjasama Penanaman Modal	067/005/DPMPSTSP-PPM/XI/2022
6	Tindaklanjut Kerjasama Penanaman Modal	067/006/DPMPSTSP-PPM/XI/2022
D. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan		
1	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	067/001/DPMPSTSP-DALAK/XI/2022



1	2	3
2	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Permintaan	067/002/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
3	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Pemantauan dan Pengawasan	067/003/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
4	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis	067/004/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
5	Pemantauan Proses Pelayanan Perizinan	067/005/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
6	Verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal	067/006/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
7	Konsultasi Virtual Masalah Penanaman Modal (Kolosal)	067/007/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
8	Helpdesk Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal	067/008/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
9	Pengawasan Rutin Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	067/009/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
10	Pengawasan Insidentil Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	067/010/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
11	Pencabutan Perizinan Berdasarkan Permohonan	067/011/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
12	Pencabutan Perizinan Berdasarkan Pelanggaran	067/012/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
13	Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan	067/013/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
14	Rekomendasi Pencabutan Perizinan	067/014/DPMPTSP-DALAK/XI/2022
E. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan		
1	Layanan Informasi Perizinan	067/001/DPMPTSP-YANDU/XI/2022
2	Penanganan Keluhan/Pengaduan Pelanggan	067/002/DPMPTSP-YANDU/XI/2022
F. Standar Operasional Prosedur pada Bagian Ke-Sekretariatan		
1	Analisis Beban Kerja	067/001/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
2	Analisis Jabatan	067/002/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
3	Cuti Tahunan	067/003/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
4	Kenaikan Gaji Berkala	067/004/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
5	Kenaikan Pangkat Pegawai	067/005/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
6	Peminjaman Aset Milik Negara	067/006/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
7	Pengadaan Barang/ Jasa	067/007/DPMPTSP-SEKR/XI/2022

1	2	3
8	Perbaikan Sarana Kantor	067/008/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
9	Surat Keluar melalui Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)	067/009/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
10	Surat Masuk melalui Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)	067/010/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
11	Surat Keluar	067/011/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
12	Surat Masuk	067/012/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
13	Perencanaan Anjab dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai	067/013/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
14	Penyusunan Pengukuran Kinerja	067/014/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
15	Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI)	067/015/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
16	Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKU)	067/016/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
17	Penyusunan LKjIP/ LAKIP	067/017/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
18	Penyusunan LPPD	067/018/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
19	Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)	067/019/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
20	Penyusunan Renstra	067/020/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
21	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	067/021/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
22	Penyusunan RKA-DPA	067/022/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
23	Pengumpulan Data Kinerja	067/023/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
24	Penyusunan Peta Proses Bisnis	067/024/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
25	Penyusunan Peta Lintas Fungsi	067/025/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
26	Penyusunan Rencana Kegiatan	067/026/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
27	Penyelenggaraan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	067/027/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
28	Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	067/028/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
29	Pembayaran Gaji Pegawai	067/029/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
30	Pembayaran Ganti Uang (GU)	067/030/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
31	Pembayaran LS Barang dan Jasa	067/031/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
32	Pembayaran Tambahan Penghasilan	067/032/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
33	Penyusunan Neraca	067/033/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
34	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	067/034/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
35	SPJ	067/035/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
36	Penyelenggaraan Rapat yang melibatkan Perangkat Daerah Teknis (Eksternal)	067/036/DPMPTSP-SEKR/XI/2022
37	Penyelenggaraan Rapat (Internal)	067/037/DPMPTSP-SEKR/XI/2022

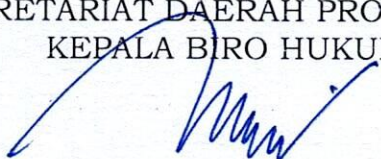
1	2	3
38	Penyusunan Rencana Kegiatan	067/038/DPMPSTP-SEKR/XI/2022
39	Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Workshop/ Forum	067/039/DPMPSTP-SEKR/XI/2022
40	Usulan Perjalanan Dinas	067/040/DPMPSTP-SEKR/XI/2022
41	Pengarsipan Dokumen	067/041/DPMPSTP-SEKR/XI/2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009